



PUTUSAN

Nomor : 0134/Pdt.G/2019/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxx binti xxxxxx, umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Xxxxxx**, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Xxxxxx bin xxxxxx, umur 53 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **Xxxxxx**, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat-surat yang terkait dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 April 2019, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor : 0134/Pdt.G/2019/PA.Tlb. tanggal 18 April 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 02 Desember 1988, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **Xxxxxx**, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 73/4/XII/1988, tanggal 02 Desember 1988;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Ka **Xxxxxx** selama kurang lebih 7

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2019/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di **XXXXXX** selama kurang lebih 5 tahun, dan kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan menumpang di Perumahan lokasi Pasar di **XXXXXX** a;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :

1. **XXXXXX**, umur 28 tahun;
2. **XXXXXX** aya, umur 26 tahun;
3. **XXXXXX** ya, umur 23 tahun;
4. **XXXXXX** ya, umur 14 tahun;

anak pertama, kedua dan ketiga sudah menikah dan sudah hidup mandiri sedangkan anak yang keempat saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan Juli 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat sering keluar malam dan sering minum-minuman keras;
- b. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
- c. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- d. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama **XXXXXX**;

6. Bahwa, pada tanggal 15 November 2014, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat di **XXXXXX** sedangkan Tergugat pulang ke rumah kediaman orang tua Tergugat di **XXXXXX** aya, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 tahun 5 bulan;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, bahkan keluarga Penggugat diantaranya Kakak dan Adik Penggugat juga keluarga Tergugat yaitu Orang tua Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2019/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum .

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak dapat memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2019, nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Tlb yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat secara tegas di persidangan.

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2019/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut .

I. ALAT BUKTI SURAT PENGGUGAT.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor : 73/4/XII/1988, tanggal 02 Desember 1988, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P)

II. ALAT BUKTI SAKSI PENGGUGAT.

1. **Xxxxxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani , bertempat tinggal di **Xxxxxxx**. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat.
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak .
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terus menerus, disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah keluarga dan telah terpengaruh wanita lain .
- ✓ Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak setahun lalu dan tidak pernah rukun kembali.
- ✓ Bahwa setelah perpisahan tersebut, pihak keluarga pernah menasehati dan berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

III.

2. **Xxxxxxx**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, bertempat tinggal di **Xxxxxxx**. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat.
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2019/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak .
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terus menerus, disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah keluarga dan telah terpengaruh wanita lain .
- ✓ Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak setahun lalu dan tidak pernah rukun kembali.
- ✓ Bahwa setelah perpisahan tersebut, pihak keluarga pernah menasehati dan berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2019/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap upaya untuk melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa proses tersebut dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan alasan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan *verstek* namun demikian untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan maka majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa alat bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang bersifat *final dan binding*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, ternyata telah ditemukan fakta yang saling bersesuaian sehingga telah menjadi fakta yang tetap sebagaimana dimaksud pasal 309 RBg, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah ekonomi keluarga dan telah terpengaruh wanita lain, serta mengakibatkan keduanya berpisah setahun dan tidak pernah rukun kembali. Fakta-fakta tersebut Tergugat telah abai tanggungjawab sebagai seorang suami.

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2019/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak patut dipertahankan, disebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perkawinan semacam ini hanya memperdalam rasa kebencian, bukan memupuk rasa kasih sayang dalam rumah tangga, sehingga jika dibiarkan justru akan terjadi kezaliman yang berlarut larut, sehingga alasan gugatan ini patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah yang tercantum dalam kitab Huriyatuz Zaujain I : 83 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2019/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti menterlantarkan Penggugat dan keempat anaknya selama setahun dengan tidak memberikan nafkah keluarga. Maka Majelis Hakim berpendapat, sikap seperti itu sebagai sikap penelantaran sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, maka dapat dijadikan alasan hukum untuk memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis 16 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 H,

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2019/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Mukhrom, SHI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Shobirin, SHI, ME,Sy dan Yunanto, SHI, MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Hj. Rahmiyati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Shobirin, SHI, ME,Sy.

Mukhrom, SHI, MH

Hakim Anggota,

Yunanto, SHI, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmiyati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000
2 Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000
3 Biaya Panggilan	Rp. 270.000
4 Biaya PNBP panggilan	Rp. 20.000
5 Redaksi	Rp. 10.000
6 Meterai	Rp. 6.000
	Rp. 396.000

Halaman 9 dari 9, Putusan Nomor : 0134/Pdt.G/2019/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)